

SOLOPOS

Diterbitkan oleh PT Aksara Solopos
Surat izin: SK Menpen No. 315/SK/
MENPEN/SU/PP/12 Agustus 1997

Pemimpin Umum: Prof. Dr. H. Sukamandi S. Gitosardjono
Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Suwarnin—Pemimpin Perusahaan: Bambang Natur Rahadi—Dewan Redaksi: Ahmad Djauhar (Ketua), Arief Budisulistio, Y. Bayu Widago, Adhitya Novliardi, Anton Wahyu Priharsono, Mulyanto Utomo—Redaktur Pelaksana: Abu Nadhir, Rini Yustini—Redaktur Senior: Mulyanto Utomo—Sekretaris Redaksi: Sri Handayani—Redaktur: Adib M Asfar, Ahmad Mufid Aryono, Alvari Kunto Prabowo, Anik Sulistyawati, Astrid Prihatini Wisnu Dewo, Ayu Pratiwiyanti, Burhan, H. Nugraha, Danang Nur Haryono, Haryono Wahyudinanto, Ichwan Prasetyo, Ivan Indrakusuma, Kaled Hasby Ashshidiq, Mugi Suryana, Oriza Vilosa, Rahmat Wilbisono, Riyanta, R. Bambang Aris S. Retnowati, Ermawati, Syaiful Arifin, Suharsih, Tika Sekar Arum, Tri Wibarto, Yonanthia Chandra Premana—Manajer Litbang dan Pustaka: Sholahuddin—Staf Redaksi: Abdul Jali, Arif Fajar S, Asiska Riviyastuti, Bayu Jatmiko Adi, Chrisna Chanis Cara, Danur Lambang Pristandaru, Farida Trisnaningtyas, Hanifah Sulastri, Hriyjah Al Wahidatul, Ika Yuniti, Adh Septiyning W, Insetyonoto, Irawan Sapto Adhi, Iskandar, Ivan Andimuhartoro, Mahardini Nur Afifah, Mariyana Ricky PD, M. Khodid Duhri, Septimia Rynthie, Satrio Andriawan, Boyolali: Akhmad Ludyanto, Aries Susanto; Klaiten: Cahyadi Kurniawan, Taufiq Sidi Prako; Karanganyar: Penco Suseno, Sri Sumi Handayani; Wonorejo: Akhmad Wakti, Ari Hartono; Sragen: Kurniawan, Tri Rahayu; Sukoharjo: Bony Eko Wicaksono, Trianto Heri Suryono; Semarang: Iman Yudi Saputro; Foto: Sunaryo Haryo Babu, sisten Manajer Lay Out: Andhi Susanto. Pengembangan Redaksi: Damar Sri Prako, Ariyanto.

Penerbit: PT Aksara Solopos—Direksi: Lulu Terianto (Presiden Direktur), Bambang Natur Rahadi (Direktur—General Manager) Usaha: Tri Wahyudi—Manajer Manajer Iklan: Wahyu Widodo—Manajer Iklan: Falan Rochmedy Farid—Manajer Sirkulasi: Franky Simon—Manajer EO: Dewi Lestari—Manajer Perijualn Buku dan Cetakan: Amir Tohari—Alamat Redaksi/Perusahaan: Griya Solopos Jl. Adisucipto No. 190 Solo 57145 Telp (0271) 72481 (hunting), Faks Redaksi (0271) 72483, Faks Perusahaan (0271) 724850—Pengaduan Iklan dan Sirkulasi: (0271) 72481;—Iklan Perwakilan Jakarta: Sari Anestini, Wisma Bisnis Indonesia Lt. 5-3 J. K.H. Mas Mansyur No. 12A Karet Tengsin, Tanah Abang Jakarta Pusat 10220, Telp (021) 57901023 ext 536 Faks (021) 57901024—Perwakilan Semarang: Jl Sompok Baru No. 79 Semarang Telp (021) 8442852—Rekening Bank: Bank BCA Cabang Singosaren 153-0194708, Bank BNI Cabang Slamet Riyadi No. Rek. Ac. 28035567 Atas nama PT. Aksara Solopos—Harga Langganan: Rp. 90.000/ bulan—Tarif Iklan: Display Hitam Putih Rp 24.000/mm kolom, Berwarna Rp 43.000/mm kolom, Kolom Rp 12.000/mm kolom, Baris Rp 12.000 (minimal 2 baris), Keluaran Hitam Putih Rp 14.000/mm kolom, Berwarna Rp 20.000/mm kolom—E-mail iklan: iklan@solopos.com—E-mail redaksi: solopos.co.id, redaksi@solopos.com—Home-page: www.solopos.co.id—Percepatan: PT Solo Grafika Utama. Isi di luar tanggung jawab percetakan.

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan *Solopos* dilindungi identitas dan tidak diperbolehkan menerima pemberian atau bentuk apapun. Jika pada kesempatan pertama wartawan tidak dapat menolak pemberian, maka pemberian tersebut akan dikembalikan melalui Sekretaris Redaksi. Penjualan di harian ini setiap edisi Senin.

Artikel diketik dengan spasi ganda maksimal 6.000 karakter disertai riwayat hidup singkat tentang penulis, foto penulis, nomor rekening bank dan NPWP (jika ada). Artikel harus orisinal dan tidak dikirimkan ke media massa lain. Setiap artikel yang dimuat merupakan pendapat pribadi penulis. Artikel yang dimuat menjadi hak redaksi *Solopos* dan dapat diterbitkan di media lain yang tergabung dalam grup Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI). Apabila lebih dari dua pekan tulisan tak dimuat, penulis berhak mengiriskan ke media lain. Honor artikel yang dimuat dapat diambil satu pekan setelah penuntasan. Pengambilan honor dibayari di Sekretaris Redaksi pada hari Senin—Jumat, pukul 13.00 WIB-18.00 WIB, dengan membawa kartu identitas dan fotokopinya yang masih berlaku.

KAMUS ESPOS

Polemik: perdebatan mengenai suatu masalah yang dikemukakan secara terbuka dalam media massa. Contoh: Artikel itu menjadi polemik berkepanjangan yang mengakibatkan penulisnya dipenjara dan kemudian diasingkan ke negeri Belanda (*Solopos*, 26 Oktober, hal. 4). Sumber: KBBI versi daring.

Demarkasi: batas pemisah, biasanya ditetapkan oleh pihak yang sedang berperang (bersengketa) yang tidak boleh dilanggar selama gencatan senjata berlangsung untuk memisahkan dua pasukan yang saling berlawanan dalam medan pertempuran; perbatasan; tanda batas. Contoh: Istilah pribumi menjadi garis demarkasi yang memisahkan antara yang asli dan tak asli, yang hitam dan putih, terjah dan penjajah, serta yang pendek dan tinggi (*Solopos*, 26 Oktober, hal. 4). Sumber: KBBI versi daring.

Pada 19 juli 1913 terbit artikel berjudul *Als ik een Nederlander was (Andai Saya Seorang Belanda)* di Majalah *De Express*. Artikel itu menjadi polemik berkepanjangan yang mengakibatkan penulisnya dipenjara dan kemudian diasingkan ke negeri Belanda.

Ki Hadjar Dewantara, sang penulis, merasa perlu melawan penguasa kolonial Belanda secara terbuka karena dirasa kejam dan sewenang-wenang. Dari artikel itulah istilah "pribumi" menjadi simbol yang menegakkan pamrih perjuangan dan harga diri.

Artikel itu dibuat untuk mengkritik anjuran pemerintah kolonial Belanda agar masyarakat di negeri ini turut merayakan 100 tahun kemerdekaan Belanda. Bagi Ki Hadjar, bagaimana mungkin satu negara merayakan kemerdekaannya dan pada saat yang bersamaan negara itu menajajah negara lain?

Dalam artikel itu Ki Hadjar menggunakan kata "inlander", ejekan bagi penduduk asli Indonesia pada masa penjajahan Belanda yang dapat pula diartikan sebagai: pribumi. Ki Hadjar dengan sengaja menggunakan kata itu karena hendak menunjukkan bahwa kaum pribumi (yang sering kali dianggap tak beradab, *uncivilized*) juga memiliki perasaan sebagaimana selayaknya manusia normal.

Artikel tersebut menunjukkan bahwa kata "pribumi" sekaligus juga digunakan sebagai wujud pembangkangan dan perlawanan terhadap keterjajahan. Setelah itu kata tersebut memiliki kuasa yang tak berhenti dalam deretan huruf, namun berpindah dalam berbagai wacana dan konsep.

Istilah pribumi menjadi garis demarkasi yang membedakan antara



Aris Setiawan
segelas.kopi.manis@gmail.com

Pengajar di Institut Seni Indonesia (ISI) Solo

yang asli dan tak asli, yang hitam dan putih, terjah dan penjajah, serta yang pendek dan tinggi. Dalam masa penjajahan kata itu menjadi sakral diucapkan karena mengandung dua konsekuensi: di satu sisi wujud penghinaan (drendahkan), tapi di sisi lain menjadi simbol perjuangan.

Dalam wacana kultural kata "pribumi" juga menemukan ruangannya. Dalam musik misalnya, gamelan dianggap sebagai musik pribumi (Jawa) yang dibenturkan dengan musik klasik berbau Eropa. Para misionaris (etnomusikolog) Eropa awalnya menganggap musik pribumi sebagai hasil budaya primitif, terlakang, dan berca rasa purwabi.

Berbeda dengan musik klasik Barat yang modern dan canggih. Kemudian timbul gerakan untuk menyebarkan musik pribumi dengan musik Barat. Diawali dari karya berjudul *Kinanthie Sandoong* pada 1916. Karya itu terilhami dari tembang di Jawa (*Kinanthie*) semasa pemerintahan Mangkunagoro IV, namun digarap untuk soprano dan piano.

Berikutnya gerakan untuk menyebarkan musik pribumi dilakukan secara sporadis dengan mendukung dukungan gamelan sebagai musik "adiluhung", bahkan mendirikan sekolah-sekolah gamelan. Kata pribumi menjadi lazim diucapkan untuk memberi penekanan sekaligus mengingat bahwa kita adalah kaum terjah.

Hal ini memantik semangat pemberontakan. Kata yang awalnya digunakan untuk "menjinakkan" kaum terjah itu menjadi kata yang membangkitkan gairah untuk menentang atau memberontak. Meminjam istilah Benedict Anderson tentang "kuasa kata",

Pribumi dalam Kuasa Kata

kata pribumi memproduksi nilai dan tafsir-tafsir baru.

Hal ini mengingatkan kita saat Orde Baru berkuasa, produksi kata yang digunakan kemudian sering kali lepas dari arti dasarnya. Kata "bakak", misalnya, menjadi sangat sakral dan *wigati*. Bukan semata berkisah tentang orang tua, tapi juga kekuasaan yang cenderung politis dan absolut.

Dimensi Mental

Kita lalu menyebut Soeharto sebagai "bakak bangsa" dan "bakak pembangunan". Kata bakak sekaligus menegakkan tentang penghormatan yang harus diberikan. Rakyat Indonesia adalah anak-anak ingusan yang wajib sopan dan takut kepada sang bakak.

Sepatuh kata yang dikeluarkan adalah produksi citra dari penguasa. Pada zaman ini kita lekat dengan frasa "revolusi mental", pada era sebelumnya ada frasa "lebih cepat lebih baik". Kata-kata itu dibuat untuk memberi ingatan pada penguasa dan kekuasaan.

Begitu juga dengan kata "pribumi". Kata itu mengandung konsekuensi pada dimensi mental saat kita harus mengingat dan mengenang nasib buruk bangsa ini akibat keterjajahan dan perbudakan. Ironisnya kata itu pada hari ini menjadi sebutuk ruang untuk mengejek, menjatuhkan, menyindir, dan menghina pihak lain.

Dengan kata itu, di satu sisi, ada upaya untuk menempatkan diri sebagai yang terjah, terzalimi, tersakiti, dan teraniaya. Di sisi lain, kata itu juga menegakkan tentang pembebasan dan kemenangan dengan ungkapan "kini saatnya pribumi jadi tuan rumah di

negerinya sendiri", sebagaimana pidato Gubernur DKI Jakarta Anies R. Baswedan.

Kata "pribumi" menjadi sangat tendensius untuk diungkapkan saat negeri ini telah jauh merengkuh kemerdekaan. Kata "pribumi" mengalami penyempitan arti, bukan semata berkisah tentang terjah dan penjajah, namun juga tentang suku, agama, ras, dan golongan.

Kita kemudian begitu mudah menyebut diri pribumi sementara yang lain nonpribumi (penjah?) hanya karena perbedaan agama dan suku. Kita begitu mudah menuduh yang lain berbeda dengan kita hanya karena warna kulit, mata, dan bentuk fisik lainnya.

Hal ini melampirkan kita pada hinaan-hinaan kaum kolonial yang menganggap diri mereka beradab, maju, dan modern, sementara yang lain adalah selibentika. Kita seakan-akan dibawa untuk kembali mengingat tentang permusuhan dan kebengisan.

Pada konteks tertentu, kata "pribumi" menjadi banal untuk diucapkan karena hal itulah muncul Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Nonpribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, atau Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan.

Tujuannya agar tak lagi memunculkan konflik berbasis sentimen suku, agama, ras, dan golongan antarsatu dengan yang lain. Bagaimanapun juga, negeri ini dibangun dari keragaman dan perbedaan, tak usah kembali dipecah belah dengan bermoldakan "kuasa kata" yakni: pribumi dan nonpribumi.

Muhammad Razi Rahman

Kantor Berita Antara

Mengoptimalkan Potensi Makanan

Nilainya Rp1.500 triliun lebih per tahun. Angka tersebut, menurut peneliti lembaga Wiratama Institute, Stessy Dwijuliantri Gulom, merupakan potensi ekonomi dari industri makanan nasional di Indonesia.

Angka tersebut diproyeksikan dari pertumbuhan omzet industri makanan di Indonesia hingga semester I-2017 yang tercatat mencapai Rp1.400 triliun. Hasil kajian Wiratama Institute juga menunjukkan industri makanan di Indonesia merupakan salah satu industri yang sangat cepat berkembang.

Industri makanan didominasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebanyak 1,57 juta unit yang mempekerjakan 3,77 juta jiwa. Perkembangan yang amat pesat ini dipengaruhi beberapa faktor, seperti pengenalan produk, rasa dan kemasan baru, pertumbuhan kelas menengah, pertumbuhan toko retail modern, dan meningkatnya kesadaran akan kesehatan.

Industri makanan dengan segala produknya dapat disebut sebagai aspek hilir dari pangan Nusantara. Bagaimana hulunya? Indonesia telah mencanangkan upaya mencapai swasembada sejumlah komoditas pangan, tetapi masih ada pihak yang memberi peringatan. Anggota Komisi VI DPR, Bambang Haryo Soekartono, mengingatkan pemerintah benar-benar mencegah lahan produktif dialihfungsikan, misalnya untuk membangun properti, agar impian swasembada pangan betul-betul tercapai.

Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya itu mencontohkan saat ini ada satu pengembangan di Jawa Barat yang membangun di lahan pertanian produktif sehingga

seharusnya penegakan hukum dilakukan sesuai regulasi tata ruang.

Pemerintah sebaiknya mencontoh Belanda yang memiliki lahan terbatas, tetapi mampu mencukupi kebutuhan pangan rakyatnya. Sorotan lainnya adalah kebijakan impor yang semakin membuat petani kehilangan semangat mengusahakan produksi dari lahan garapan mereka.

Anggota Komisi IV DPR, Firman Subagio, dalam sejumlah kesempatan menyortir permasalahan alih fungsi lahan pertanian, padahal saat ini Indonesia masih memerlukan tambahan lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat.

Banyak lahan pertanian produktif, khususnya di Jawa, yang saat ini telah dialihfungsikan. Politikus Partai Golongan Karya itu mengingatkan, berdasarkan data PBB, pertumbuhan penduduk global pada 2050 diperkirakan mencapai hingga sekitar 9,3 miliar orang.

Pangan Lokal

Populasi yang membengkak tersebut tentu berpengaruh terhadap kebutuhan pangan dunia, termasuk Indonesia. Sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan pangan warga Nusantara, pemerintah mendorong pengembangan dan peningkatan konsumsi pangan khas lokal di berbagai wilayah. Hal tersebut bakal mengurangi tingkat ketergantungan terhadap beras sebagai makanan pokok karena jenis makanan yang disantap semakin beragam. Dalam perayaan Hari Pangan Sedunia 2017 yang digelar di Pontianak, Kalimantan Barat, 18-21 Oktober 2017, digelar lomba menciptakan menu dari bahan pangan lokal.

Tujuan lomba tersebut untuk

menciptakan menu makanan yang lebih beragam, bergizi, seimbang, dan aman berbasis sumber daya lokal. Dengan lebih memperkenalkan sumber daya pangan khas lokal di berbagai provinsi diharapkan juga bisa menurunkan tingkat konsumsi beras nasional.

Pemerintah Provinsi Papua mendorong peningkatan produksi pangan lokal agar kelak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk saat pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX pada 2020. Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara meminta para pedagang komoditas sayuran di Kota Ternate memprioritaskan produksi lokal dari kabupaten/kota lainnya di provinsi itu dalam memenuhi kebutuhan konsumen.

Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, gencar mempromosikan pangan lokal sinonggi, kasuami, kambose, dan kabuto atau sikkato sebagai panganan khas daerah itu. Wali Kota Kendari, Asrun, di Kendari, Senin (18/9), mengatakan salah satu upaya promosi yakni dengan cara bekerja sama dengan pengelola hotel, restoran, dan rumah makan agar menjadikan pangan sikkato sebagai menu utama.

Penganan lokal sikkato merupakan panganan berbahan nonberas. Sinonggi berbahan baku sagu. Kasuami berbahan baku singkong. Kambose berbahan baku jagung. Kabuto berbahan baku ubi kayu. Dalam rangkaian peringatan Hari Pangan Sedunia itu juga digelar seminar bertajuk *Menggerakkan Generasi Muda untuk Membangun Pertanian di Wilayah Perbatasan*.

Salah satu pembicara dalam seminar itu adalah wakil FAO Indonesia, Mark Smulders. Ia mengingatkan saat ini di Indonesia, sebagaimana juga terjadi di banyak negara lainnya, banyak warga

yang bermigrasi dari daerah rural atau kawasan perdesaan.

Bila Indonesia berketetapan menjadi lumbung pangan dunia sesuai visi pemerintah, tentu saja harus ada tenaga kerja yang memproduksinya, sedangkan lahan pertanian lazimnya ada di perdesaan. Kepala peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Hizkia Respatiadi, ingin pemerintah bersikap proaktif mengantisipasi beragam tantangan yang bisa menghambat cita-cita bangsa mewujudkan swasembada pangan.

Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain bertambahnya jumlah penduduk, berkurangnya lahan pertanian, dan semakin menuanya usia warga yang memilih mata pencaharian di sektor pertanian. Pemerintah dapat meningkatkan integrasi dengan pasar internasional dalam rangka menstabilkan harga pangan Nusantara.

Ketersediaan komoditas pangan akan membuat harga pangan stabil dan mempermudah akses semua lapisan masyarakat, apalagi dengan harga pangan yang terjangkau, maka pemerintah memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk menciptakan ketahanan pangan.

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Susan Herawati, mengingatkan keadulatan pangan sesungguhnya bukan sekadar pencapaian target produksi, tetapi juga mengangkat harkat kesejahteraan penyedia pangan.

Pemerintah juga perlu lebih serius menyelesaikan beragam permasalahan terkait aktivitas pertanian dan perikanan.

Dengan giat mengantisipasi serta mengatasi berbagai permasalahan tersebut, pada masa mendatang cita-cita swasembada pangan bukanlah suatu hal yang utopis.

TAJUK

Pemajuan Kebudayaan

Pemerintah mulai merumuskan rencana aksi pemajuan kebudayaan untuk menjalankan amanat UU No. 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang disahkan pada 27 April 2017 lalu.

Pada pertengahan 2019 ditargetkan sudah tersusun Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan yang akan digunakan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Langkah awal dimulai dengan penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten/kota.

Pokok pikiran/kebudayaan daerah ini disusun oleh pemerintah daerah dan masyarakat tingkat kabupaten/kota yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi dalam pemajuan kebudayaan beserta usulan solusinya.

Pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten/kota ini kemudian disatukan di tingkat provinsi untuk dilakukan kompilasi. Proses di provinsi ini yang kemungkinan berjalan lama karena ada tanggung jawab pemajuan kebudayaan lokal yang terkait erat dengan alokasi APBD.

Dalam UU Pemajuan Kebudayaan ada 10 objek, antara lain tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Yang paling mendasar dari pemajuan kebudayaan adalah jangan berorientasi materi, program, dan target; misalnya sekian museum yang diperbaiki, sekian permainan rakyat yang direvitalisasi, sekian bentuk ritual yang dilestarikan, dan sejenisnya.

Pemajuan kebudayaan hendaknya berorientasi lebih mendasar, yaitu aspek manusia, kemanusiaan, dan kehidupan manusia dalam ranah kemanusiaan itu. Pemajuan kebudayaan menjadi pekerjaan yang harus dilakukan simultan setiap saat dengan melibatkan banyak sektor. Langkah demikian tak akan tercurupi hanya dengan program dan target.

Kebudayaan bukan sekadar masalah kalkulasi kuantitatif yang bisa memberikan manfaat materi sebagai hasil kegiatan industri pariwisata. Kebudayaan merupakan investasi bangsa yang harus terus dipelihara dan dikembangkan menurut potensi kearifan lokal yang melibatkan semua penduduknya.

Program-program yang akan dirumuskan hendaknya tidak terlalu bersifat formal dan birokratis yang justru menyulitkan para penjaga budaya dan pemerintah sendiri. Toh, selama ini para penjaga budaya tersebut sudah terbiasa mandiri tanpa terlalu bergantung pada pemerintah.

Yang tak kalah penting adalah sosialisasi UU itu sendiri yang harus terus dilaksanakan. Seindah-indahnya program yang dirumuskan akan sia-sia jika para penjaga budaya justru tak tahu mereka dilindungi dan mendapat dukungan yang lebih daripada sebelum ada UU itu.

Semua memang butuh energi dan waktu. Jika semua bersatu padu, pemajuan kebudayaan akan menuntun arah bangsa semakin jelas dan maju.

NUWUN SEWU

- Presiden menunda pembentukan Densus Tipikor sampai batas waktu yang tidak ditentukan.
- Sama saja dengan menolak halus.
- Sebanyak 24 Guru di Wonogiri keracunan makanan dalam workshop peningkatan mutu pendidikan.
- Sayang makanannya tidak bermutu.